



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Desember 2021

Halaman: 5



SEMPAT JADI SELTER - Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Bener, Tegalrejo yang sempat difungsikan untuk selter Covid-19. DPUPKP Kota Yogyakarta masih menyelesaikan pengerjaan satu rusunawa lagi.

TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

Pemkot Usulkan Rusunawa untuk Warga Berpenghasilan Rendah

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta berencana mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Yogyakarta. Tujuannya, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah yang layak. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, mengatakan rusunawa merupakan solusi paling baik agar MBR dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Hunian vertikal dianggap paling cocok di Kota Yogyakarta.

"Rusunawa memang sangat diperlukan di Kota Yogyakarta. Kepadatan tinggi, orang yang membutuhkan rumah juga semakin tinggi, jadi hunian vertikal memang yang paling cocok.

Kalau nggak gitu nanti ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta nggak ada," katanya, Selasa (7/12).

Ada empat rusunawa di Kota Yogyakarta yang terletak di Prawirodirjan, Suryatmajan, dan ada dua rusunawa di Bener. Satu rusunawa di Bener sudah selesai dan dijadikan shelter Covid-19, sedangkan satu rusunawa lagi masih dalam proses pembangunan.

Ia menyebut rusunawa Bener sudah ideal untuk menjadi hunian, sebab mempunyai kecukupan ruang. Rusunawa tersebut memiliki dua kamar, dapur, kamar mandi, hingga ruang makan. "Tipe 36, jadi cocok untuk MBR. Harapannya nanti setelah 2 kali 3 tahun, bisa menabung untuk membeli rumah sendiri," ujarnya.

Menurut dia, meski sudah ada pem-

angunan dua rusunawa baru di Bener, masih diperlukan tambahan rusunawa lagi. Sigit mengungkapkan kapasitas Rusunawa Bener I hanya bisa menampung 42 KK, sedangkan Bener II untuk 44 KK.

"Dari dua rusunawa itu kan berarti hanya bisa untuk 86 KK saja. Masih perlu ditambah lagi. Jadi untuk 2022 kami akan mengusulkan lagi ke pusat (pembangunan rusunawa), karena anggaran ada di pusat," sambungnya.

"Masalahnya kalau rusunawa MBR itu ketentuannya luasnya 2.500 meter persegi, sementara kalau di Kota Yogyakarta kan susah sekali untuk mencari tanah seluas itu. Makanya, kami sedang berkomunikasi bisa tidak kalau disesuaikan dengan luas tanah di Kota Yogya," jelasnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005